



KOTA DENPASAR

**RANCANGAN AKHIR
RENCANA KERJA TAHUN
ANGGARAN 2024**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA DENPASAR**



WALIKOTA DENPASAR
PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 32 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan sinkronisasi program dan kegiatan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2024, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi oleh Bappeda disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3);
17. Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 37);
18. Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1);
19. Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Denpasar Semesta Berencana Tahun 2024 yang selanjutnya disebut RKPD adalah Dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

7. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.
- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RKPD.
- (3) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V : Penutup

Pasal 4

Susunan dan sistematika Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah secara berkala atas pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah.

- (2) Laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Walikota melalui Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan masukan dan pertimbangan untuk penyusunan perencanaan tahun berikutnya.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 7 Agustus 2023

WALIKOTA DENPASAR,



I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 7 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,



IDA BAGUS ALIT WIRADANA
BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2023 NOMOR 32

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 32 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2024

DAFTAR RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR
TAHUN 2024

1. RENJA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA DENPASAR TAHUN 2024
2. RENJA DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR TAHUN 2024
3. RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DENPASAR TAHUN 2024
4. RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2024
5. RENJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA DENPASAR TAHUN 2024
6. RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DENPASAR TAHUN 2024
7. RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DENPASAR TAHUN 2024
8. RENJA DINAS SOSIAL KOTA DENPASAR TAHUN 2024
9. RENJA DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KOTA DENPASAR TAHUN 2024
10. RENJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DENPASAR TAHUN 2024
11. RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA DENPASAR TAHUN 2024
12. RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DENPASAR TAHUN 2024
13. RENJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KOTA DENPASAR TAHUN 2024
14. RENJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2024
15. RENJA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA DENPASAR TAHUN 2024
16. RENJA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KOTA DENPASAR TAHUN 2024
17. RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DENPASAR TAHUN 2024
18. RENJA DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR TAHUN 2024
19. RENJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA DENPASAR TAHUN 2024
20. RENJA DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2024

21. RENJA DINAS PARIWISATA KOTA DENPASAR TAHUN 2024
22. RENJA DINAS PERTANIAN KOTA DENPASAR TAHUN 2024
23. RENJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2024
24. RENJA INSPEKTORAT KOTA DENPASAR TAHUN 2024
25. RENJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2024
26. RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2024
27. RENJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2024
28. RENJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA DENPASAR TAHUN 2024
29. RENJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2024
30. RENJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2024
31. RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA DENPASAR TAHUN 2024
32. RENJA KECAMATAN DENPASAR BARAT KOTA DENPASAR TAHUN 2024
33. RENJA KECAMATAN DENPASAR TIMUR KOTA DENPASAR TAHUN 2024
34. RENJA KECAMATAN DENPASAR SELATAN KOTA DENPASAR TAHUN 2024
35. RENJA KECAMATAN DENPASAR UTARA KOTA DENPASAR TAHUN 2024


PEMERINTAH KOTA DENPASAR



RENCANA KERJA (RENJA)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA DENPASAR
TAHUN 2024

Renja Perangkat Daerah diatas menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

WALIKOTA DENPASAR,



I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA



KATA PENGANTAR

Om Swastiastu

Dengan memanjatkan puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya kami dapat menyampaikan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar Tahun 2024.

Rencana Kerja memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka pelaksanaan misi organisasi. Rencana Kerja ini juga dilengkapi dengan indikator kinerja kegiatan dan program sehingga memudahkan untuk mengukur capaian kinerjanya. Selanjutnya Rencana Kerja sebagai komitmen kinerja yang hendak dicapai, diajukan sebagai bahan dalam suatu penetapan kinerja sebagai kesepakatan terhadap Rencana Kerja.

Melalui Rencana Kerja ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar.

Om Santi , Santi, Santi Om.

Denpasar, 7 Agustus 2023

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Denpasar



Angga Agung Nguh Bawa Nendra, SH., M.Si

NIP. 670418 199703 1 002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB. I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB. II . EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DENPASAR TAHUN LALU	5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar	5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar.....	21
2.3. Isu – isu Strategis penyelenggaraan Satuan Polisi Pamong Praja.....	22
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	23
BAB. III . TUJUAN , SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN	32
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	36
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar	37
3.3. Program dan Kegiatan	37
BAB. IV . RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DENPASAR.....	44
4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan	44
BAB.IV . PENUTUP	48



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah baik yang dilaksanakan langsung oleh perangkat daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar yang berisikan program dan kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Satpol PP.

Di dalam Pasal 12 Undang – Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa masalah penyelenggaraan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat merupakan Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, maka penyusunan Renja Satpol PP perlu direncanakan dengan cermat agar dapat bersinergi dengan program pembangunan lainnya secara berkesinambungan.

Berdasarkan dokumen Rencana Strategis Kota Denpasar tahun 2021–2026, sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maka dilakukan penjabaran ke dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT). Dalam pengukuran kinerja ada beberapa tahapan yang dilakukan yaitu, perjanjian, pengumpulan data dan cara pengukuran kinerja.

Pengukuran kinerja sebagai dokumen perencanaan ini mengakomodasi faktor politis dan aspiratif sehingga secara resmi mengikat seluruh aparat di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar dalam melaksanakan kegiatan perekonomian dan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, disamping untuk penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah setiap tahunnya.



Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar

Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar dilaksanakan dengan memperhatikan Visi Kota Denpasar yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Visi : ***“Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju”*** dan guna mewujudkan Visi Kota Denpasar Tahun 2021-2026 disusun misi antara lain:

- 1) Meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Denpasar melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat yang berkeadilan.
- 2) Menjaga stabilitas keamanan dengan terkendalinya kamtibmas, ketahanan pangan, dan kesiapsiagaan bencana.
- 3) Kejujuran dan spirit Sewaka Dharma sebagai penguat reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
- 4) Unggul dalam kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dan inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis Tri Hita Karana.
- 5) Penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berlandaskan kebudayaan Bali.

Mengacu kepada visi dan misi Kota Denpasar, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar yang merupakan Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Denpasar, maka tugas pokok dan fungsinya adalah: **“Membantu Walikota menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta Perlindungan Masyarakat”**

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar adalah :

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);



- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- m. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016);



- n. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar 2021 – 2026
- o. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar 2021 – 2026

1.3. Maksud dan Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar adalah untuk memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2024 untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renja Satpol PP Kota Denpasar Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mencakup :

BAB I	:	PENDAHULUAN
BAB II	:	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) TAHUN LALU
BAB III	:	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
BAB IV	:	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V	:	PENUTUP



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DENPASAR TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu berdasarkan target indikator kinerja program tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. **Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi keluaran yang direncanakan:**
- b. **Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi keluaran yang direncanakan:**
- c. **Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi memenuhi keluaran yang direncanakan:**

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar Tahun 2022 diwujudkan dalam 2 Program, 6 kegiatan dan 14 sub kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Denpasar DPA Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar Tahun 2022 dengan total nilai keseluruhan sebesar Rp21,236,232,624 dengan realisasi mencapai Rp20,669,761,389 dengan persentase serapan dana APBD mencapai 97,33%.



Sedangkan untuk capaian kinerja Renstra Tahun 2022 disajikan dalam table berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Di Kota Denpasar	86,38%	94,34%	100%

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar Tahun 2021 diwujudkan dalam 2 Program 5 kegiatan dan 14 sub kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Denpasar DPA Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar Tahun 2021 dengan total nilai keseluruhan sebesar Rp 24,010,167,461 dengan realisasi sampai bulan Desember mencapai Rp22,016,682,324 , dengan persentase serapan dana APBD mencapai 91,69%. Untuk target renstra tahun 2021 tidak dapat diperbandingkan dengan capaian tahun 2022 karena periode renstra yang berbeda

2.1.1 Realisasi Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam TA. 2022 sudah dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah ditargetkan dan capaian fisik sebesar 100% sedangkan keuangannya realisasinya sebesar 97,33 %. Dalam pelaksanaan anggaran di tahun 2022 ada beberapa kali pergeseran atau rasionalisasi terhadap anggaran yang dilaksanakan oleh Satua Polisi Pamong Praja Kota Denpasar yang mana hasil daripada rasionalisasi/pergeseran anggaran tersebut dipergunakan untuk mendukung percepatan penanganan covid-19 di Kota Denpasar

Sedangkan Akuntabilitas keuangan yang dicapai oleh Sat.Pol PP Kota Denpasar tahun 2022 berdasarkan alokasi langsung per program dan kegiatan dapat disajikan sebagai berikut :



Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar Tahun 2022

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	Sisa Anggaran	%
BELANJA OPERASI	21.200.232.624	20.635.668.389,	564.564.235	97.34
Belanja Pegawai	15.836.019.880	15.581.859.682	254,160,198	98.40
Belanja Barang dan Jasa	5.364.212.744,	5.053.808.707	310,404,037	94.21
Belanja Modal	36.000.000	34.093.000	1,907,000	94,70

Sedangkan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat dalam tabel berikut :



Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Tahun 2022
1	2	3	4	5
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase pemenuhan layanan penunjang kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah terbayarnya gaji pegawai	118 Orang	118 Orang
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 paket
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 paket
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 paket

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA DENPASAR



Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Tahun 2022
1					2	3	4	5
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 paket
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 dokumen	3 dolumen
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	1 Laporan
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	1 Laporan
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	1 Laporan
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik daerah yang layak pakai	100 %	100 %
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	56 Unit	56 Unit
					Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	137 Unit	Unit
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	
					PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda	88.84	89,14

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA DENPASAR



Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Tahun 2022
1					2	3	4	5
					UMUM			
						Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3	84.78	98,58
						Rasio Satlinmas	3.2	3.12
					Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota yang tertangani	250 Kasus	250 Kasus
					Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota yang tertangani	250 Kasus	250 Kasus
					Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang tertangani	250 Kasus	250 Kasus
					Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	250 Kasus	250 Kasus
					Penyediaan Layanan Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 Laporan	1 Laporan



1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pelaksanaan program,kegiatan dan sub kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar Tahun 2022 secara keseluruhan telah mencapai target kinerja sesuai dengan Rencana Kerja Tahun 2022.Pelaksanaan program,kegiatan dan sub kegiatan tersebut mendukung indikator Kinerja Utama (IKU) dan sasaran strategis yang ada pada Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar. Secara keseluruhan realisasi program,kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar Tahun 2022 telah tercapai 100% sehingga dari 2 program dan 6 kegiatan, tidak ada program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja.

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Dari 2 program, 6 kegiatan dan 14 sub kegiatan yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar, seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan telah memenuhi target/kinerja yang ditetapkan Tahun 2022, antara lain:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dimana didalamnya terdapat 4 Kegiatan dan 11 Sub Kegiatan. Adapun persentase capaian kinerja telah memenuhi target kinerja yang direncanakan yaitu 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 20,477,267,805

b. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum yang terdapat 2 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan Adapun presentase capaian kinerja telah memenuhi target kinerja yang direncanakan yaitu 100 % dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 192,493,584.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2023, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satpol PP sebagai berikut :

1. Mengingat mobilitas penduduk yang relatif tinggi dan dengan terbitnya Perda yang baru merupakan salah satu sebab masih banyak masyarakat yang belum mengetahui/memahami Perda/Perkada.



2. Kompetensi dan jumlah aparatur yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja saat ini belum optimal dalam melayani tuntutan masyarakat di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang semakin meningkat seiring dengan kemajuan teknologi informasi.
3. Belum optimalnya sinergitas antar Perangkat Daerah dengan Satpol PP
4. Terbatasnya jumlah anggota Satpol PP yang ada;

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Satpol PP dalam pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan daerah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pada Perangkat Daerah Satpol PP Kota Denpasar tidak terdapat program/kegiatan yang realisasinya melebihi target kinerja yang telah ditetapkan.

4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra perangkat daerah

Implikasi atau dampak yang timbul dari target capaian program pada Satpol PP Kota Denpasar adalah sebagai berikut:

- Terhadap program/kegiatan yang realisasinya telah memenuhi target kinerja yang sudah ditetapkan berdampak positif bagi kinerja perangkat daerah.
- Terhadap program/kegiatan yang realisasi keuangannya belum memenuhi target kinerja yang sudah ditetapkan berdampak pada penyerapan anggaran Perangkat Daerah.

5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Tindakan yang diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target pelaksanaan program kegiatan sebagaimana diuraikan seperti diatas adalah:

- (1) Terkait permasalahan tersebut, Satpol PP secara proaktif melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait perangkat daerah khususnya insiator Perda serta meningkatkan koordinasi/sinergitas serta terus berupaya mempelajari serta memahami aturan –aturan yang dimuat dalam Perda/Perkada sehingga tidak menimbulkan permasalahan dalam penerapannya di lapangan.



(2) Dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat baik masyarakat umum, masyarakat pengusaha termasuk melalui pembinaan dan pengawasan, serta secara berkelanjutan terus melaksanakan pembinaan teknis guna meningkatkan kompetensi aparatur Pol PP sehingga mampu memberikan pelayanan yang optimal dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

(3) Memberikan sosialisai dan motivasi kerja kepada aparatur Pol PP secara intensif;

Selanjutnya disajikan Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar

Tabel 2.2

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6 = (5/4)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase pemenuhan layanan penunjang kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah terbayarnya gaji pegawai	109 Orang	109 Orang	100 %
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum	100 %	100 %	100 %



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6 = (5/4)
		Perangkat Daerah			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100 %
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100 %
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100 %
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100 %
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 dokumen	3 dokumen	100 %
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	1 laporan	100 %
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	100 %
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	100 %
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik daerah yang layak pakai	100 %	100 %	100 %
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau	56 Unit	56 Unit	100 %



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6 = (5/4)
	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	137 Unit	137 Unit	100 %
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100 %
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda	89.34%	89.34%	100 %
		Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3	88.11%	88.11%	100 %
		Rasio Satlinmas	3,2	3,2	100 %
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota yang tertangani	250 Kasus	250 Kasus	100 %
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota yang tertangani	250 Kasus	250 Kasus	100 %
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang tertangani	250 Kasus	250 Kasus	100 %
	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman	Jumlah Kasus Gangguan	250 Kasus	250 Kasus	100 %



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6 = (5/4)
	dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan			
	Penyediaan Layanan Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 Laporan	1 Laporan	100 %

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar.

Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Struktur organisasi Sat. Pol. PP Kota Denpasar dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011, tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja; Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Peraturan Walikota Denpasar Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk dengan kedudukan sebagai Lembaga Teknis Daerah.

Susunan Organisasi Satuan Polisi pamong Praja Kota Denpasar terdiri dari :

1. Kepala Satuan
2. Sekretariat, dipimpin oleh seorang sekretaris yang bertanggung jawab kepada Kepala Satuan, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian



- b. Sub Bagian Keuangan
- c. Sub Bagian Program
3. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Satuan terdiri dari :
 - a. Seksi Operasional dan Pengendalian
 - b. Seksi Penertiban
4. Bidang Penegakan Peraturan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Satuan, terdiri dari:
 - a. Seksi Pembinaan, Penyuluhan, dan Pengawasan
 - b. Seksi Penyelidikan, Penyidikan, dan Penindakan
5. Bidang Perlindungan Masyarakat, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Satuan terdiri dari:
 - a. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat
 - b. Seksi Pengerahan dan Pengendalian Linmas
6. Bidang Sumber Daya Aparatur, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Satuan terdiri dari:
 - a. Seksi Pelatihan Dasar
 - b. Seksi Teknis Fungsional

Sat.Pol. PP Kota Denpasar memiliki peranan yang strategis karena diposisikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki tugas pokok dan fungsi melaksanakan segala program turunan kegiatan yang berkaitan Penegakkan hukum utamanya adalah penegakkan Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Walikota (Perwali) dan peraturan perundang-undangan lainnya. Serta sebagai pelaksana ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

Permasalahan

- a. **Permasalahan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar antara lain :**
 - a. Masih tingginya angka pelanggaran Perda Kota Denpasar.
 - b. Masih kurangnya wawasan, dan keterampilan, Personil Sat.Pol PP serta keterbatasan jumlah personil anggota Satpol PP Kota Denpasar



- c. Masih kurangnya kesadaran hukum masyarakat untuk mematuhi Perda dan Perwali di Kota Denpasar
- d. Masih Kurangnya Kesadaran Masyarakat Kota Denpasar Untuk mematuhi protokol Kesehatan dalam masa pandemi Covid-19
- e. belum optimalnya penegakan perda /perwali di Kota Denpasar karena belum adanya sistem terintegrasi dengan SKPD terkait yang dapat mempercepat efektivitas dan efisiensi penegakan perda
- f. keberadaan Satuan Perlindungan Masyarakat di tatanan Pemerintahan Desa / Lurah Perlu lebih diberdayakan lagi dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban

Setelah dilakukan pengukuran dari kinerja Tahun 2022 diperoleh hasil capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar sebesar 97.33%. Dengan capaian kinerja tersebut maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar dapat dikategorikan sebagai Perangkat Daerah yang baik dalam capaian kinerja. Yang disajikan dalam tabel berikut :



Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar

NO	Indikator	SPM	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
<i>1</i>	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Di Kota Denpasar	standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	86,38 %	88,11%	89,43%	90,55%	94,34%		89,43%	90,55%	



2.3 Isu Strategis Penyelenggara Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra, maka dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja. Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan polisi Pamong Praja. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dirumuskan sebagai berikut :

Perlunya Peningkatan Kualitas Penegakan Perda dan Perwali serta penanganan gangguan Tramtibum dan Perlindungan Masyarakat Di Kota Denpasar, yang disertai dengan peningkatan kualitas dan kuantitas aparat Satpol PP, dengan meningkatkan sinergitas antar lembaga dan partisipasi Masyarakat

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD :

Salah satu tujuan dilakukannya review terhadap Rancangan Awal RKPD adalah untuk menghindari inkonsistensi substansi Renja Satuan Polisi Pamong Praja dengan berbagai rumusan yang sudah tertuang dalam Rancangan Awal RKPD, karena pada hakikatnya Renja tersebut disusun untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan serta target program dan kegiatan yang sudah dirumuskan dalam Rancangan Awal RKPD. Pada akhirnya, Renja juga akan mengalami penyempurnaan setelah Rancangan RKPD tersebut sudah ditetapkan menjadi RKPD.

Hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dalam kaitannya dengan analisis kebutuhan Renja Satuan Polisi Pamong Praja disajikan dalam Tabel 2.3 berikut:



Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar tahun 2024

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhandana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Denpasar	Persentase pemenuhan layanan penunjang kinerja Perangkat Daerah	100 %	24,087,240,157	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Denpasar	Persentase pemenuhan layanan penunjang kinerja Perangkat Daerah	100 %	24,087,240,157	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Denpasar	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	17,262,622,457	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Denpasar	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	17,262,622,457	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Denpasar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	109 Orang	17,262,622,457	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Denpasar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	109 Orang	17,262,622,457	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Denpasar	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	416,546,500	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Denpasar	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	416,546,500	
	Penyediaan Komponen Instalasi	Kota Denpasar	Jumlah Paket Komponen Instalasi	1 Paket	15,205,000	Penyediaan Komponen Instalasi	Kota Denpasar	Jumlah Paket Komponen Instalasi	1 Paket	15,205,000	

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA DENPASAR**



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhandana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Denpasar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	158,743,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Denpasar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	158,743,000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Denpasar	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	5,400,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Denpasar	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	5,400,000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Denpasar	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	21,600,500	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Denpasar	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	21,600,500	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	20,520,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	20,520,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Denpasar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	195,078,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Denpasar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	195,078,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Denpasar	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4,418,611,200	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Denpasar	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4,418,611,200	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Kota Denpasar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,	1 laporan	188,280,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Kota Denpasar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,	1 laporan	188,280,000	

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA DENPASAR**



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhandana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Air dan Listrik		Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			Air dan Listrik		Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Denpasar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	4,230,331,200	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Denpasar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	4,230,331,200	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Denpasar	Persentase pemenuhan kebutuhan Barang milik Daerah	100 %	352,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Denpasar	Persentase pemenuhan kebutuhan Barang milik Daerah	100 %	352,000,000	
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kota Denpasar	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	16 Unit	114,000,000	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kota Denpasar	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	16 Unit	114,000,000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Denpasar	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	238,000,000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Denpasar	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	238,000,000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Denpasar	Persentase layanan kepegawaian perangkat daerah	100 %	471,980,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Denpasar	Persentase layanan kepegawaian perangkat daerah	100 %	471,980,000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Denpasar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	232 paket	471,980,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Denpasar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	232 paket	471,980,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Denpasar	Persentase Barang Milik daerah yang layak pakai	100 %	1,165,480,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Denpasar	Persentase Barang Milik daerah yang layak pakai	100 %	1,165,480,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Kota Denpasar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau	56 Unit	1,038,200,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Kota Denpasar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau	56 Unit	1,038,200,000	

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA DENPASAR**



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhandana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			
	Pemeliharaan Mebel	Kota Denpasar	Jumlah Mebel yang Dipelihara	9 Unit	11,250,000	Pemeliharaan Mebel	Kota Denpasar	Jumlah Mebel yang Dipelihara	9 Unit	11,250,000	
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kota Denpasar	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	137 Unit	91,030,000	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kota Denpasar	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	137 Unit	91,030,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Denpasar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	25,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Denpasar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	25,000,000	
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kota Denpasar	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda	'89.84%	537,052,350	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kota Denpasar	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda	'89.84%	537,052,350	
		Kota Denpasar	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3	'89.43%			Kota Denpasar	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3	'89.43%		
		Kota Denpasar	Rasio Satlinmas	3,2			Kota Denpasar	Rasio Satlinmas	3,2		
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kota Denpasar	Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota yang tertangani	250 Kasus	148,999,850	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kota Denpasar	Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota yang tertangani	250 Kasus	148,999,850	

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA DENPASAR**



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhandana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kota Denpasar	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	1 Laporan	148,999,850	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kota Denpasar	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	1 Laporan	148,999,850	
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Denpasar	Jumlah Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang tertangani	250 Kasus	388,052,500	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Denpasar	Jumlah Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang tertangani	250 Kasus	388,052,500	
	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kota Denpasar	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	250 Kasus	115,521,000	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kota Denpasar	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	250 Kasus	115,521,000	
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Kota Denpasar	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	50 Orang	144,572,500	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Kota Denpasar	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	50 Orang	144,572,500	

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA DENPASAR**



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhandana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Denpasar	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	119,159,000	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Denpasar	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	119,159,000	
	Penyediaan Layanan Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Kepala Daerah	Kota Denpasar	Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 Laporan	8,800,000	Penyediaan Layanan Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Kepala Daerah	Kota Denpasar	Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 Laporan	8,800,000	



2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .

Di era reformasi birokrasi saat ini, proses perencanaan tidak hanya dilakukan secara *top down* akan tetapi juga secara *bottom up* artinya pihak pemerintah juga harus dapat mengakomodir usulan dari masyarakat terkait rencana pembangunan daerah melalui proses Musrenbang. Sehingga dalam menyusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan polisi Pamong Praja Tahun 2024 juga mengakomodir berbagai usulan dari para *stakeholders* seperti masyarakat selain program dan kegiatan yang telah dirumuskan oleh Satuan polisi Pamong Praja terkait rencana pencapaian target RPJMD Kota Denpasar dan Renstra Satuan polisi Pamong Praja Kota Denpasar Tahun 2021-2026

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada rumusan isu- isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional.

Telaahan terhadap kebijakan nasional sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema dan prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional.

Kebijakan Nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 tertuang Hal – hal sebagai berikut :

TEMA PEMBANGUNAN :

“MEMPERCEPAT TRANSFORMASI EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN” PRIORITAS NASIONAL

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan & menjamin pemerataan
3. Meningkatkan SDM berkualitas & berdaya saing
4. Revolusi mental & pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim

7. Memperkuat stabilitas polhukanham dan transformasi pelayanan publik

Sedangkan yang menjadi Tema dan prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2024 adalah:

“PERCEPATAN TRANSFORMASI EKONOMI KERTHI BALI YANG HIJAU, TANGGUH, DAN SEJAHTERA, SERTA PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH.” Dengan PRIORITAS :

1. Pertanian, kelautan, IKM, UMKM, dan Pariwisata
2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan
3. Tenaga Kerja dan Keejahteraan Sosial
4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya
5. Lingkungan Hidup
6. Infrastruktur
7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi

Tema dan Prioritas Pembangunan Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

“ MEMPERKUAT DAYA SAING DEGAN MENGOPTIMALKAN POTENSI DAERAH UNTUK DENPASAR MAJU”

Prioritas Pembangunan Tahun 2024 :

1. Pendidikan dan Kesehatan
2. Ekonom Kreatif, Pariwisata dan kebudayaan
3. Sosial dan ketenagakerjaan
4. Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan
5. Reformasi Birokrasi

Memperhatikan arah kebijakan Nasional dan Kota Denpasar Tahun 2024, Renja Satpol PP Kota Denpasar Tahun 2024 mendukung prioritas Pembangunan Kota yaitu Infrasturktur dan Stabilitas Keamanan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satpol PP yaitu penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota (Perda dan Perwali), serta sebagai

OPD yang mengemban tugas dalam Pemeliharaan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat, serta aspek perlindungan masyarakat,

3.2. Tujuan dan Sasaran

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor- faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Satpol PP sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam menjalankan fungsi Penegakkan hukum, dalam hal ini adalah penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota (Perda dan Perwali), serta sebagai OPD yang mengemban tugas dalam Pemeliharaan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat, serta aspek perlindungan masyarakat. Tujuan dan sasaran Renja Satpol PPKota Denpasar Tahun 2024 didasarkan pada perumusan tujuan dan sasaran atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Rencana Strategis Satpol PP Kota Denpasar 2021 – 2026, adalah sebagai berikut :

a. Tujuan :

Meningkatnya penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Di Kota Denpasar

b. Sasaran :

Meningkatnya Kualitas layanan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Di Kota Denpasar

3.3 Program, Kegiatan dan sub kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama

dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Program selalu berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan tertentu sebagaimana ditetapkan dalam strategi. Dalam menetapkan program telah dipertimbangkan “siapa melakukan apa” dan jangka waktu penyelesaiannya. Dengan demikian program adalah salah satu cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan. Kegiatan merupakan titik awal tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam mewujudkan visi dan misi Kota Denpasar.

Untuk mewujudkan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan serta dalam rangka pencapaian target kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar Tahun 2024 maka program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program Kegiatan dan sub kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025

No	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju 2025	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / PaguIndikatif	Sumber Dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / PaguIndikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				24,624,292,507				31,474,750,521
	PROGRAM PENUNJANGAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang kinerja Perangkat Daerah	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	24,087,240,157	APBD Kota Denpasar		100 %	30,665,856,103
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	17,262,622,457	APBD Kota Denpasar		100 %	22,073,534,678

No	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju 2025	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / PaguIndikatif	Sumber Dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / PaguIndikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	109 Orang	17,262,622,457	APBD Kota Denpasar		109 Orang	22,073,534,678
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	416,546,500	APBD Kota Denpasar		100 %	486,562,125
	Penyediaan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	15,205,000	APBD Kota Denpasar		1 Paket	17,485,750
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	158,743,000	APBD Kota Denpasar		1 Paket	190,088,100
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	5,400,000	APBD Kota Denpasar		1 Laporan	6,210,000

No	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju 2025	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / PaguIndikatif	Sumber Dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / PaguIndikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penyediaan Barang dan Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	21,600,500	APBD Kota Denpasar		1 Paket	24,840,575
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Dokumen	20,520,000	APBD Kota Denpasar		3 Dokumen	23,598,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	195,078,000	APBD Kota Denpasar		1 Laporan	224,339,700
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	4,418,611,200			100%	4,606,815,300
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	188,280,000	APBD Kota Denpasar		1 Laporan	253,322,000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	4,230,331,200	APBD Kota Denpasar		1 Laporan	4,353,493,300
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Barang milik Daerah		100%	352,000,000			100%	1,539,518,800

No	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju 2025	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / PaguIndikatif	Sumber Dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / PaguIndikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16 Unit	114,000,000	APBD Kota Denpasar		16 Unit	287,454,000
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Unit	238,000,000	APBD Kota Denpasar		4 Unit	1,252,064,800
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peresntase layanan kepegawaian perangkat daerah		100%	471,980,000			100%	590,373,200
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	232 Paket	471,980,000	APBD Kota Denpasar		232 Paket	590,373,200
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik daerah yang layak pakai		100%	1,165,480,000			100%	1,369,052,000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	56 Unit	1,038,200,000	APBD Kota Denpasar		56 Unit	1,193,930,000
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Unit	11,250,000	APBD Kota Denpasar		25 Unit	12,937,500

No	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju 2025	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / PaguIndikatif	Sumber Dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / PaguIndikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	137 Unit	91,030,000	APBD Kota Denpasar		137 Unit	104,684,500
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	25,000,000	APBD Kota Denpasar		100 %	57,500,000
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda		89.84 %	537,052,350			90.34 %	808,894,418
		Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3		89.43 %				90.95 %	
		Rasio Satlinmas		3,2				3.21	
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota yang tertangani		250 Kasus	148,999,850	APBD Kota Denpasar		250 Kasus	224,500,528
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	148,999,850	APBD Kota Denpasar		1 Laporan	224,500,528

No	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju 2025	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / PaguIndikatif	Sumber Dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / PaguIndikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang tertangani		250 Kasus	388,052,500	APBD Kota Denpasar		250 Kasus	584,393,890
	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	250 Kasus	115,521,000	APBD Kota Denpasar		250 Kasus	185,484,650
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Orang	144,572,500	APBD Kota Denpasar		50 Orang	193,409,875
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	119,159,000	APBD Kota Denpasar		1 Dokumen	194,175,200
	Penyediaan Layanan Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	8,800,000	APBD Kota Denpasar		1 Laporan	11,324,165



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SAT.POLPP KOTA DENPASAR

4.1. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana kerja adalah serangkaian tujuan dan proses yang bias membantu perangkat daerah mencapai tujuan tersebut. Dengan adanya rencana perangkat daerah, dalam hal ini pimpinan akan memahami skala prioritas dengan lebih baik. Rencana kerja juga dapat membantu aparatur dalam perangkat daerah melaksanakan kegiatan dengan baik dan teratur, disamping itu rencana kerja yang tersusun dengan baik, akan menghasilkan pembagian tugas yang baik pula. Sebagaimana diuraikan dalam Bab III, mengenai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk 5 tahun kedepan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar.

Dalam pelaksanaan pembangunan urusan Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2023 ini seluruh kegiatan diarahkan untuk mendukung kesuksesan visi misi Kota Denpasar dan visi misi Walikota – Wakil Walikota terpilih serta merealisasikan target pada urusan wajib pelayanan dasar, untuk lebih jelasnya pada tabel dibawah ini akan diuraikan lebih lanjut keterkaitan sasaran, indikator sasaran, target yang ditetapkan pada tahun 2024 serta program, kegiatan, dan sub kegiatan pendukungnya disertai dengan sumber pendanaannya



Tabel 4.1
Rencana Program Kegiatan sub kegiatan dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Denpasar Tahun 2024

No	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang kinerja Perangkat Daerah	100 %	24,087,240,157
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	17,262,622,457
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	109 Orang	17,262,622,457
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	416,546,500
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15,205,000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	158,743,000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	5,400,000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	21,600,500
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	20,520,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	195,078,000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4,418,611,200
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	188,280,000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	4,230,331,200
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Barang milik Daerah	100 %	352,000,000
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	16 Unit	114,000,000
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	238,000,000



No	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peresntase layanan kepegawaian perangkat daerah	100 %	471,980,000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	232 paket	471,980,000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik daerah yang layak pakai	100 %	1,165,480,000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	56 Unit	1,038,200,000
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	9 Unit	11,250,000
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	137 Unit	91,030,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	25,000,000
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda	'89.84%	537,052,350
		Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3	'89.43%	
		Rasio Satlinmas	3,2	
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota yang tertangani	250 Kasus	148,999,850
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	1 Laporan	148,999,850
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang tertangani	250 Kasus	388,052,500
	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	250 Kasus	115,521,000
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan	50 Orang	144,572,500



No	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Asasi Manusia	Kapasitasnya		
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	119,159,000
	Penyediaan Layanan Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 Laporan	8,800,000



BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar tahun 2024 disusun dalam rangka meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintah daerah yang efektif, optimal dan efisien dalam rangka mencapai tujuan program dan sasaran pembangunan. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar Tahun 2024 penyusunannya dilakukan berdasarkan RPJMD daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 serta mengacu pada evaluasi kegiatan tahun sebelumnya. Renja ini merupakan acuan / pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja pemerintah daerah Kota Denpasar. Agar realisasi program kegiatan sesuai dengan sasaran maka diperlukan semangat, komitmen dan disiplin yang tinggi dari pelaksana pemerintahan dan segenap pemangku pembangunan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

Demikian Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar Tahun 2024 ini disusun, dengan harapan dapat bermanfaat bagi pihak – pihak berkepentingan.

Denpasar, 7 Agustus 2023

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Denpasar



Angga Agung Nengah Bawa Nendra, SH., M.Si

NIP. 6670418 199703 1 002